

**PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN
DALAM PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA
DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN PRINGKUKU DAN
DESA MENDOLO KIDUL KECAMATAN PUNUNG
KABUPATEN PACITAN**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh:

**Siti Puji Lestari
NIM. 05142199/ MP**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2010**

INTISARI

Salah satu program pertanahan yang telah dikeluarkan pemerintah guna mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pendaftaran bidang-bidang tanah yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), yang dilaksanakan secara massal dan dibiayai oleh pemerintah. Di samping itu untuk menggerakkan kesadaran masyarakat agar turut serta dalam mendaftarkan tanahnya melalui PRONA, Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan mengadakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan yang mengikutsertakan peran aktif masyarakat, yang dapat dilihat dari kegiatan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) salah satu diantaranya yaitu dalam pelaksanaan PRONA. Pokmasdartibnah di Desa Sugihwaras dan Mendolo Kidul belum berperan aktif tetapi pelaksanaan PRONA dapat berhasil. Atas dasar hal tersebut di atas penulis mengadakan penelitian dengan judul "Peran Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan Dalam Proyek Operasi Nasional Agraria Di Desa Sugihwaras Kecamatan Pringkuwu dan Desa Mendolo Kidul Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan". Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kegiatan administrasi,yuridis dan teknis yang dilakukan oleh Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PRONA di Desa Sugihwaras dan Mendolo Kidul serta bagaimana peran Pokmasdartibnah dalam bidang administrasi,yuridis dan teknis dalam pelaksanaan PRONA itu tinggi atau rendah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PRONA di Desa Sugihwaras dan Mendolo Kidul serta untuk mencari argumen bahwa peran Pokmasdartibnah tinggi atau rendah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena atau keadaan yang terjadi dalam masyarakat pada masa kini, tanpa didasarkan pada hipotesis tertentu. Jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, kemudian data yang diperoleh dari wawancara maupun dari dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kegiatan Pokmasdartibnah di desa Mendolo Kidul dan desa Sugihwaras dalam membantu pelaksanaan PRONA hanya dilakukan oleh Perangkat Desa hal ini dibuktikan dengan perannya Kepala Dusun dan Sekretaris Desa dalam membantu kegiatan pendataan peserta dan Pengumpulan berkas.Pokmasdartibnah Desa Mendolo Kidul dan desa Sugihwaras belum bisa mewujudkan sasaran PRONA yaitu belum bisa mewujudkan peran serta masyarakat karena tidak semua anggota Pokmasdartibnah terlibat dalam pelaksanaan PRONA.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Pendaftaran Tanah.....	7
2. Pendaftaran Tanah Melalui PRONA.....	10
3. Pokmasdartibnah sebagai sarana pendukung pelaksanaan PRONA.....	13
4. Peran Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PRONA.....	19
B. Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Penetapan Informan	25

D. Teknik Penjaringan Informan	26
E. Jenis dan Sumber data.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Letak dan Wilayah Administrasi.....	32
B. Kondisi Fisik Wilayah.....	36
C. Penggunaan Tanah	36
D. Status Tanah	38
E. Keadaan Sosial Ekonomi.....	39
1. Jumlah Penduduk	39
2. Tingkat Pendidikan.....	40
3. Mata Pencaharian	41
4. Tingkat Kesejahteraan	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) Dalam Pelaksanaan PRONA	45
1. Pembentukan Pokmasdartibnah di Desa Mendolo Kidul dan Sugihwaras.....	45
2. Kegiatan Pokmasdartibnah Dalam Pelaksanaan PRONA Di Desa Mendolo Kidul dan Sugihwaras	52
B. Tingkat Partisipasi Pokmasdartibnah Dalam Pelaksanaan PRONA Di Bidang Administrasi, Yuridis dan Teknis, Rendah	75
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal, tempat menjalani kehidupan bermasyarakat dan sumber matapencaharian sehari-hari. Pembangunan juga membutuhkan tanah sebagai unsur pokok, sehingga hal ini mengakibatkan nilai tanah selalu meningkat. Peningkatan nilai tanah ini harus disertai dengan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah, agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Pentingnya kepastian kepemilikan tanah merupakan alasan dilaksanakannya pendaftaran tanah.

Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menyebutkan bahwa untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, harus diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya, peraturan tersebut diikuti

dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), yang merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan pendaftaran tanah. Pelaksanaan PRONA berdasarkan pada Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 963-310-D.11 Tanggal 28 Maret 2008 tentang petunjuk teknis PRONA. Selain PRONA, upaya dalam peningkatan pelayanan pendaftaran tanah lainnya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan, meliputi : Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) dan Usaha Mikro Kecil (UMK).

Peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat melalui PRONA, diperlukan perhatian mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya program tersebut, salah satunya adalah upaya membangun partisipasi (peran serta) masyarakat. Hal tersebut menjadi sangat penting karena keberhasilan PRONA di suatu tempat tergantung dari partisipasi masyarakatnya. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan sasaran PRONA, perlu dilembagakan secara permanen Kelompok Masyarakat

Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) di wilayah Kelurahan atau Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan.

Langkah awal dari Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan adalah Gerakan Nasional pemasangan tanda batas pemilikan tanah secara mandiri oleh masyarakat yang diawasi serta dibina oleh aparat Kantor Pertanahan. Pemasangan tanda batas pemilikan tanah dilakukan oleh pemilik tanah dan disaksikan oleh para pemilik tanah yang saling berdampingan secara bersama-sama, yang tergabung dalam suatu wadah yang dinamakan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah). Pokmasdartibnah merupakan organisasi yang dibentuk untuk membantu Kantor Pertanahan.

Salah satu kegiatan pelayanan pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan melalui kegiatan PRONA dan melibatkan Pokmasdartibnah adalah pelaksanaan PRONA di Desa Sugihwaras Kecamatan Pringkuku dan Desa Mendolo Kidul Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Hal ini untuk meningkatkan minat masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah karena minat masyarakat masih sangat rendah jika pensertipikatan tanah dilaksanakan secara sporadik dengan biaya sendiri, sehingga diperlukan program pensertipikatan tanah melalui PRONA. Mengingat

hal tersebut diatas, perlu dibentuk Pokmasdartibnah di Desa Sugihwaras dalam rangka membantu Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan PRONA, diantaranya: penyuluhan, pelengkapan berkas-berkas yang diperlukan, dan pemasangan tanda-tanda batas.

Kepala Desa Sugihwaras telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sugihwaras Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Tim Pengurus Pokmasdartibnah di Desa Sugihwaras Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dan Kepala Desa Mendolo Kidul menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mendolo Kidul Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pembentukan Pengurus Pokmasdartibnah Desa Mendolo Kidul Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Hal ini dimaksudkan agar Pokmasdartibnah di Desa Sugihwaras berperan dalam mendukung pelaksanaan PRONA sehingga dapat berhasil akan tetapi pada kenyataannya meskipun peran Pokmasdartibnah dalam bidang administrasi, yuridis dan teknis masih rendah, pelaksanaan PRONA di Desa Mendolo Kidul dan Desa Sugihwaras dapat berhasil.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Peran Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan Dalam Proyek Operasi Nasional Agraria Di Desa Sugihwaras Kecamatan Pringkuku dan Desa Mendolo Kidul Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegiatan administrasi, yuridis dan teknis apa saja yang dilakukan oleh Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PRONA di Desa Sugihwaras Kecamatan Pringkuku dan di Desa Mendolo Kidul Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan ?
2. Bagaimana tingkat partisipasi Pokmasdartibnah dalam bidang administrasi, yuridis dan teknis dalam pelaksanaan PRONA itu tinggi atau rendah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Pokmasdartibnah dalam PRONA di Desa Sugihwaras Kecamatan Pringkuku dan di Desa Mendolo Kidul Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan
- b. mencari argumen, bahwa tingkat partisipasi Pokmasdartibnah dalam bidang administrasi, yuridis dan teknis itu tinggi atau rendah.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. bahan masukan Kantor Pertanahan dalam rangka peningkatan peran Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PRONA atau kegiatan pelayanan pendaftaran tanah lainnya;
- b. mengembangkan minat masyarakat untuk bergabung dalam Pokmasdartibnah dan menumbuhkan minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pokmasdartibnah Desa Mendolo Kidul dan Desa Sugihwaras yang membantu dalam rangka pelaksanaan PRONA di Desa Mendolo Kidul, Kecamatan Punung, dan Desa Sugihwaras, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2008 adalah perangkat desa yang tergabung dalam Pokmasdartibnah. Hal tersebut antara lain dibuktikan dengan perannya Kepala Dusun, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Pembangunan serta Kepala Urusan Pemerintahan dalam membantu kegiatan pendataan peserta dan pengukuran bidang tanah serta perannya masyarakat peserta PRONA dalam pengumpulan berkas dan pemasangan tanda batas, meskipun semua anggota Pokmasdartibnah tidak membantu dalam pelaksanaan PRONA akan tetapi pelaksanaan PRONA tetap berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa Mendolo Kidul dan Sugihwaras terutama peserta PRONA.
2. Pokmasdartibnah Desa Mendolo Kidul dan Desa Sugihwaras dalam pelaksanaan PRONA belum bisa mewujudkan peran serta masyarakat karena yang membantu pelaksanaan PRONA hanya

perangkat Desa dan belum bisa menumbuhkan minat masyarakat golongan ekonomi lemah karena peserta PRONA ada yang dari masyarakat golongan ekonomi menengah keatas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mengingat keaktifan dalam membantu penyelesaian pensertipikatan tanah melalui PRONA hanya dilakukan oleh perangkat Desa, maka untuk masa yang akan datang perlu adanya perubahan mengenai anggota Pokmasdartibnah agar dipilih dari masyarakat dan sebagian perangkat Desa sehingga akan tampak keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan Pokmasdartibnah dan keaktifan Pokmasdartibnah.
2. Adanya peran Pokmasdartibnah yang masih rendah, sebaiknya dari Kantor Pertanahan Kabupaten melakukan penyuluhan rutin 1 tahun sekali kepada Pokmasdartibnah, sehingga pada masa yang akan datang dapat berperan aktif dalam melaksanakan suatu program pertanahan yang didukung oleh Pokmasdartibnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Susi (1999). *Studi Tentang Kesadaran Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) Dalam Menunjang Penyelesaian Pensertipikatan Tanah di Kecamatan Jetis Kabupaten Karanganyar*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Astuti Dwi, Lily (2008). Peran serta Kantor Pertanahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kecil Kabupaten Cianjur Provinsi Jabar. *Laporan Hasil Penelitian Dosen*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Daniel Abdi,Prasojo. (2003). *Studi Pelaksanaan PRONA Di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan).Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I. Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2004). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Edisi 2004. Djambatan, Jakarta.
- Kistiyah Sri, (2004). Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS Di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, *Laporan Penelitian*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesebelas. Penerbit PT Remaja Rosdakarya , Bandung.
- Mudjiono. (1997). *Politik Dan Hukum Agraria*. Cetakan Pertama. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Risnarto, (2004). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanahan*.Jurnal IPTEK Pertanahan Kajian Informasi Data Pertanahan, Vol IV No.1, Maret 2004, Penerbit Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

- Rumidi, Sukandar. (2004). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah untuk Peneliti Pemula*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sanyata, Nugraha. (1997) *Penelitian Pelaksanaan PRONA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Tahun 1994/1995*. Jurnal Pertanahan No.7/ Januari -1997, Penerbit Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Suharno, (2003). *Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pensertipikatan tanah di Kabupaten Purworejo Provinsi Jateng*. Bumi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Surakhmad, Winarno. (1994). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*. Tarsito, Bandung.
- Sutaryono. (2007). *Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Tata Guna Tanah Di daerah*. Widya Bumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional RI.

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan.

Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Nomor 963-310-D.11 Tanggal 28 Maret 2008 tentang petunjuk teknis PRONA.

Pedoman Pembentukan POKMASDARTIBNAH, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, 2007.